

KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT BERKELANJUTAN

(Studi Pada Desa Jajar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

FIGI DWI DARIANTI

NPM 22101091015



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2025

RINGKASAN

Figi Dwi Darianti, 22101091015, Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, 2025, “Kebijakan
Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Berkelanjutan (Studi Pada Desa Jajar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)”,
Dosen Pembimbing 1 Dr. Hayat, S.AP., M.Si, Dosen Pembimbing 2 Dr.
Suyeno, S.Sos., M.AP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Jajar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, sebagai upaya pemenuhan akses air bersih secara berkelanjutan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada permasalahan terbatasnya akses air bersih yang masih dialami sebagian besar masyarakat desa, meskipun telah dilaksanakan program PAMSIMAS. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik James E. Anderson yang terdiri dari lima tahapan: identifikasi masalah, perumusan kebijakan, penetapan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PAMSIMAS di Desa Jajar masih menghadapi berbagai kendala, seperti distribusi air yang belum merata, minimnya infrastruktur pendukung, serta keterbatasan anggaran dan daya beli masyarakat dalam memenuhi standar teknis program. Meskipun demikian, program ini telah memberikan kontribusi awal terhadap penyediaan akses air bersih dan mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi dan pola hidup sehat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perencanaan kebijakan yang lebih inklusif dan evaluasi berkala agar kebijakan dapat mencapai tujuan layanan air bersih yang merata dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, PAMSIMAS, Air Bersih, Sanitasi, Desa Jajar

SUMMARY

Figi Dwi Darianti, 22101091015, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, 2025. "Policy of the National Program for Sustainable Community-Based Drinking Water and Sanitation Provision (A Study in Jajar Village, Wates District, Kediri Regency)." Supervisor 1: Dr. Hayat, S.AP., M.Si Supervisor 2: Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP

This study aims to analyze the Policy of the National Program for Community-Based Drinking Water and Sanitation Provision (PAMSIMAS) in Jajar Village, Wates District, Kediri Regency, as an effort to provide sustainable access to clean water. The background of this research is based on the issue of limited clean water access still experienced by a large portion of the community despite the implementation of the PAMSIMAS program. This research employs a descriptive qualitative approach, using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The study is based on James E. Anderson's public policy theory, which includes five stages: problem identification, policy formulation, policy adoption, policy implementation, and policy evaluation. The results show that the implementation of PAMSIMAS in Jajar Village still faces several obstacles, including uneven water distribution, inadequate supporting infrastructure, and limited budget and community affordability to meet the program's technical standards. However, the program has contributed to the initial provision of clean water access and raised awareness of the importance of sanitation and healthy living habits. The study recommends more inclusive policy planning and regular evaluation to ensure that the policy achieves its goal of equitable and sustainable clean water services.

Keywords: *Publik Policy, PAMSIMAS, Clean Wates, Sanitation, Jajar Village*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kenaikan jumlah penduduk dan persebaran tidak merata menjadi permasalahan dihadapi negara berkembang tidak merata, masalah yang dihadapi negara berkembang. Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun berdampak kepadatan penduduk di Indonesia terus meningkat. Pertambahan penduduk yang cepat ini menyebabkan akibat serius terhadap keseimbangan sumber daya alam. (Ehrlich & Holdren, 1971) menguraikan masalah ukuran dan pertumbuhan populasi pemanfaatan dan penimpisan sumberdaya dan kerusakan lingkungan secara bersama dan global.

Dalam pertumbuhan penduduk maka perkembangan suatu kota diiringi dengan memberikan pengembangan layanan pada warga pada wilayah pembangunan. Bentuk pelayanan mendasar menjadi tugas tanggung jawab Pemerintah daerah Kabupaten/Kota adalah perancangan kebutuhan air minum dan sanitasi yang berkaitan dengan keadaan kesehatan masyarakat.

Air merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia yang harus terpenuhi dan terjangkau. Air bersih fundamental dalam hidup manusia menyangkut kehidupan banyak orang dan berpengaruh dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Ketersediaan air bersih sangat penting karena pemanfaatan untuk keperluan dalam rumah tangga, fasilitas umum, sosial, dan ekonomi. Tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mendapat air yang memuaskan, khususnya masyarakat kelas bawah.

Pengertian air bersih menurut Menteri Kesehatan (2017) Permenkes No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk keperluan Hygiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua* dan Pemandian Umum, adalah air yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang memenuhi standar kesehatan dan dapat langsung dikonsumsi setelah dimasak. Kualitas air secara umum menunjukkan tingkat atau keadaan air yang berhubungan dengan suatu aktivitas atau kebutuhan tertentu, sehingga penting untuk memahami bagaimana air dapat dianggap bersih dari segi kualitas dan dapat digunakan dalam jumlah yang cukup untuk kegiatan sehari-hari.

Kementerian Kesehatan (2010) Permenkes No. 492 Tahun 2010, yang dimaksud dengan air minum adalah air yang telah melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi standar kesehatan dan dapat langsung dikonsumsi. Air minum yang berkualitas adalah air yang tidak terkontaminasi secara berlebihan oleh zat-zat kimia atau mineral, terutama oleh zat-zat atau mineral yang berbahaya bagi kesehatan. Diharapkan bahwa zat atau bahan kimia yang terdapat dalam air minum tidak merusak wadah penyimpanan air, sementara zat atau bahan kimia serta mineral yang diperlukan oleh tubuh sebaiknya ada dalam kadar yang sesuai dalam sumber air minum tersebut. Perbedaan antara air bersih dan air minum mungkin bukan isu yang sering dipikirkan. Sebagian besar orang mungkin beranggapan bahwa air bersih dapat digunakan untuk diminum, sama halnya dengan air minum yang dianggap selalu bersih. Namun, jika kita menganalisisnya dengan lebih teliti, kedua jenis air ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Air bersih adalah air yang memenuhi kriteria kualitas tertentu dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, serta dapat dikonsumsi setelah dimasak. Di sisi lain, Air dengan persyaratan kesehatan bisa diminum tanpa resiko dan tidak membahayakan tanpa perlu dimasak. Kedua jenis air ini memiliki parameter kualitas yang berbeda, seperti warna, kejernihan, pH, kandungan natrium, mangan, bau, dan rasa.

Indonesia (2019) UU No. 17 Th. 2019 mengenai Sumber Daya Air Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dalam kewenangan kuat mengarahkan sumber daya air, bertugas dalam pemenuhan pokok air di masyarakat. Pemerintah juga mengarahkan dan menyerahkan kewenangan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya air dan menghimbau kepada warga untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air.

Pertumbuhan penduduk pesat mendapati dampak dari pertumbuhan penduduk dan banyak pemukiman padat serta penurunan daya dukung lingkungan. Maka ketersediaan air bersih masyarakat atau penduduk Desa Jajar semakin naik dan dampak yang diakibatkan dari adanya pertumbuhan penduduk harus disikapi dengan tepat.

Menurut Bautista dkk., (1995) terlaksananya kebutuhan air bersih merupakan faktor penting bagi kelanjutan suatu kapasitas ekonomi. Selanjutnya perbandingan air yang dipakai pemanfaatannya untuk keperluan domestik dan kegiatan urban sangat terbatas jika disamakan kapasitas menyeluruh air, jika digabungkan kualitas terus-menerus berdampak pada

fasilitas air bersih bagi masyarakat dan kepentingan di perkotaan kadang kala menjadi perkara.

Kualitas air bersih yang bermutu baik serta mengalir secara berkelanjutan adalah harapan yang diperlukan oleh semua masyarakat. Air yang bersih dapat memajukan kualitas masyarakat dalam berkehidupan. Kasus yang membuat perhatian publik sekarang di Desa Jajar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri adalah separuh masyarakat mendapati kesulitan dalam memperoleh air bersih yang bermutu baik serta air yang mengalir konsisten. Salah satu faktor memengaruhi posisi masyarakat atau penduduk yang jauh dari sumber air yang membutuhkan banyak Waktu dan tenaga untuk memperoleh pasokan air bersih. Masyarakat juga memanfaatkan sumber air tanah untuk menghasilkan air bersih. Maka kasus yang muncul pada saat musim hujan berdampak pada air menjadi kotor.

Akses air bersih bagi penduduk suatu wilayah merupakan fondasi infrastruktur yang sangat krusial untuk mendorong perkembangan daerah tersebut. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah warga, maka keperluan air bersih turut bertambah, baik dari aspek standar maupun kapasitas. Air sudah tidak lagi dianggap sebagai komoditas yang melimpah ruah dan gratis untuk digunakan, tetapi telah berevolusi menjadi aset ekonomi yang makin terbatas, sehingga dibutuhkan tata kelola yang efektif. (Kodoatie et al, 2010).

Sehubungan dengan hal tersebut perencanaan, persiapan matang amat perlu dalam penyediaan infrastruktur air bersih. Ketersediaan air bersih di permukiman harus memenuhi kebutuhan volume, mendapati akses

pengambilan mudah baik dari segi jarak maupun waktu, harganya harus terjangkau oleh semua warga.

Pembangunan yang berlandaskan pedesaan penting dalam mengoptimalkan fondasi ekonomi negara, menuntaskan kemiskinan dan mengurangi ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah. Pembangunan dibutuhkan untuk memodifikasi dari arah kurang baik ke arah lebih baik yang seimbang dengan keperluan hidup masyarakat banyak.

Tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan umum yang bermutu, beraturan transparan, dijalankan dengan cepat dan dengan pembiayaan yang wajar, telah terus mengemuka dari masa ke masa. Permintaan ini meningkat bersamaan dengan meningkatnya pemahaman bahwa penduduk dalam kehidupan berbangsa negara yang demokratis mempunyai hak untuk diperhatikan. Merupakan tanggung jawab aparat pemerintah untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan permintaan para penduduk tersebut (Suyeno, 2014).

Pemerintah berupaya untuk melakukan pembangunan program Bangunan Air Minum dan Sanitasi dengan Keterlibatan Masyarakat (PAMSIMAS). Dirintis tahun 2008 yang memiliki tujuan untuk memperbaiki total pelayanan pada masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan kecil di pedesaan. Dengan adanya PAMSIMAS, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan air bersih yang berkepanjangan dan menambah semangat masyarakat dalam berperilaku hidup sehat dan bersih.

Dalam Pedoman Pamsimas (2008) Program ini serangkaian pelaksanaan supply dengan basis community berasal dari partisipasi warga, pemerintah regional, pemerintah central Bank World, disuport Instansi Pekerjaan Umum atau organisasi yang responsible terhadap eksekusi kegiatan, kolaborasi bersama Department of Health. Objektif program sebagai upaya service objek komunitas rural, area pinggir kota, adapun mengaplikasikan gaya hidup sehat higienis secara menghidupkan supply community based sustainable dapat diadopsi baik oleh warga.

Bupati Kediri (2016) menyatakan Perbup Kab. Kediri No.44 Tahun 2016. Pemerintah desa memiliki peranan dalam supervisi sarana air bersih yang berada di daerah pedesaan. Sehingga menjadi responsibility Disperkim Kab. Kediri dan Pemerintah Desa memiliki peranan dalam supervisi sarana air bersih yang berada di daerah pedesaan. Sehingga menjadi responsibility melakukan guidance pada grup masyarakat SPAMS mati/ tidak ada operasi.

Sejalan program nasional Universal Access Air Minum dan Sanitasi tahun 2019, menetapkan target layanan air minum sanitasi layak berkelanjutan, dengan 100% cakupan akses air minum, Jelas bahwa kondisi real-time yang berada di Kabupaten Kediri tidak compatible. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Pembangunan awal PAMSIMAS pada Desa Jajar dilakukan pada tahun 2019 dibawah naungan DISPERKIM. Kontrak awal bermula info dari dinas terkait dinas terkait soal bantuan PAMSIMAS. Dari info tersebut pihak pemerintah desa mengajukan proposal dan akhirnya terealisasi. Akhirnya

terjadilah kontrak antara dinas terkait, pemerintah desa, KKM (Kesatuan Keswadayaan Masyarakat) dan SATLAK (Satuan Pelaksana) untuk menjalankan program PAMSIMAS.

Pendanaan dari pemerintah untuk Pembangunan PAMSIMAS yaitu Rp 245.000.000,00. Dan dana untuk syarat swadaya sebesar Rp. 14.000.000,00. Dengan harga per kubik air Rp.1.000,00 per meter. Hasil awal riset sehingga tempat tersebut dipilih untuk dijadikan mata air karena setelah di ukur menggunakan alat geolistrik tempat itu cocok untuk membangun sumur mata air dengan pertimbangan lokasi yang berada ditengah desa dan tanahnya lumayan tinggi sehingga air mengalir kencang.

Kementerian PUPR (2016) menyatakan terdapat ketentuan umum penetapan lokasi sasaran PAMSIMAS meliputi :

1. Kawasan desa Baru Non-Binaan Pamsimas belum ada mendapat support PAMSIMAS.
2. Desa Pasca ialah desa/kelurahan yang sudah pernah mendapat support Inisiatif Pamsimas memfinalisasi Inisiatif belum *reach* 100%.

Menu development proyek ada dalam (Peraturan Menteri PUPR No. 27 Tahun 2016) terkait pelaksanaan SPAM mengandung.

1. Pemugaran Total

Kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana baru. Untuk daerah yang belum ada pelayanan SPAM.

2. Eskalasi

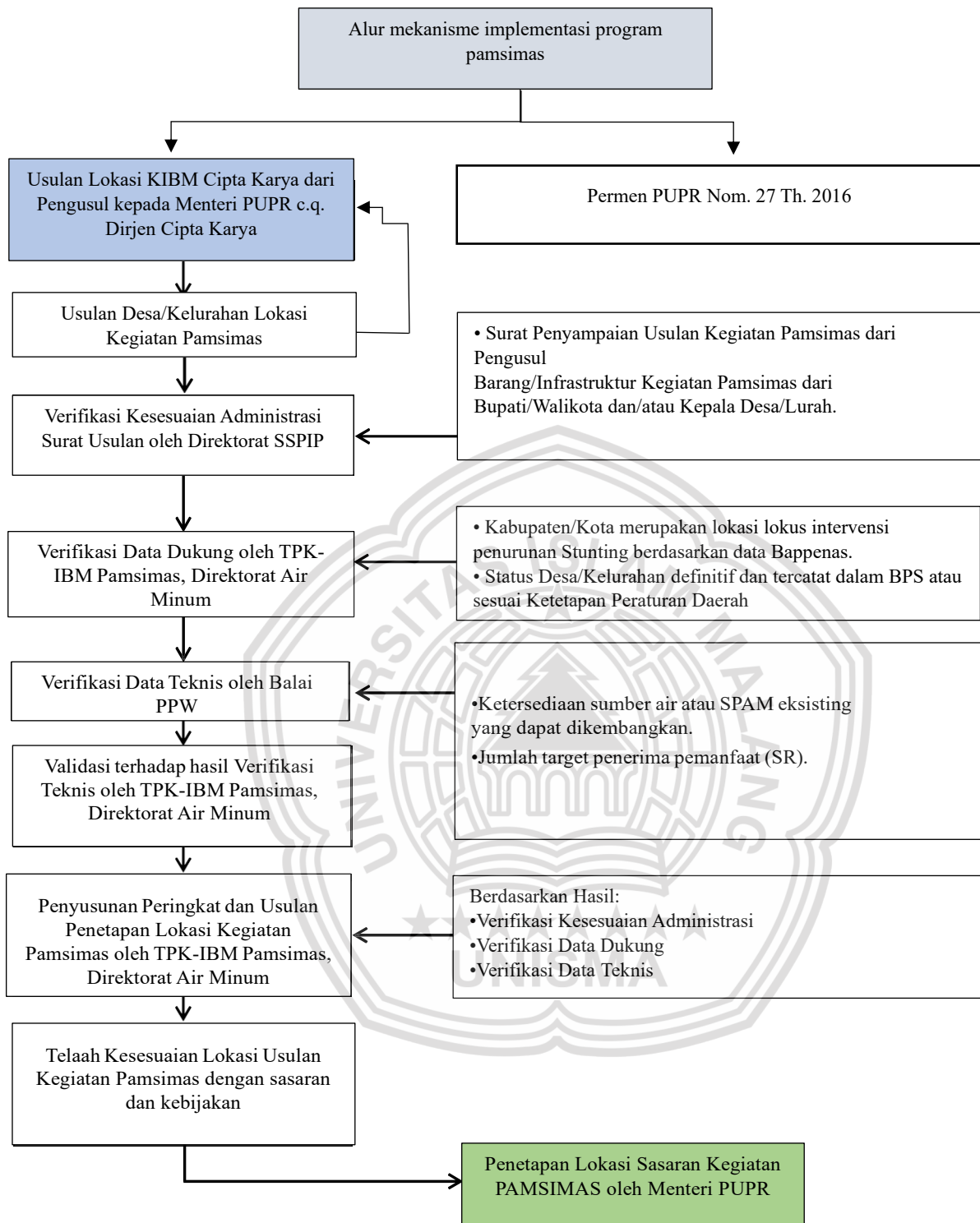
Kegiatan untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan. Untuk pembangunan kapasitas baru atau tambahan produksi pada daerah yang sudah ada SPAM.

3. Ekskansi

Diimplementasikan sebagai pelayanan air melibatkan berbagai aktivitas. Meliputi pengembangan SPAM jika terjadi rusak membuat tidak berfungsi hingga bisa dipakai kembali.

Ditetapkan area target diselenggarakan secara open bertanggung jawab untuk mendapati kemanfaatan dan output program secara maksimal serta percepatan *achievement* akses 100% air minum. Tahapan dilakukan melalui situs Banper Kementerian PUPR dan aplikasi SIPPa modul Proposal IBM/Padat Karya.

Berdasarkan alur prosedur mekanisme penetapan lokasi sasaran pembangunan telah ditetapkan dalam pedoman teknis, terdapat beberapa tahapan sistematis yang harus dilalui untuk memastikan ketepatan sasaran dan efektivitas program pembangunan infrastruktur di tingkat Masyarakat.



Gambar 1.1 : Prosedur Penetapan Lokasi Sasaran Pembangunan

Tabel 1.1 Alur mekanisme implementasi pamsimas

No	Aktivitas	Uraian	Supervisor.	Hasil/Keterangan
1.	Usulan Lokasi dari Pengusul	• Surat Usulan Lokasi Kegiatan Pamsimas • Lampiran Daftar Usulan Lokasi Kegiatan Pamsimas Dokumen sebagai lampiran Surat Usulan Lokasi adalah sebagai berikut (<i>selambat-lambatnya disampaikan sebelum Verifikasi Teknis</i>). • Surat Surat Pernyataan Minat dan Komitmen menerima Barang/Infrastruktur Program Pamsimas dari Bupati/Walikota, serta Data Teknis Desa/Kelurahan Usulan Kegiatan Pamsimas. • Surat Pernyataan Tidak Termasuk Air	Pengusul • Pemerintah Kabupaten/Kota Balai PPW (Tim Verifikasi BPPW)	Surat Pengusul dikirim buat Menti PUPR

Tabel 1.1 Alur mekanisme implementasi pamsimas

No	Aktivitas	Uraian	Supervisor.	Hasil/Keterangan
		minum daerah Surat Pernyataan Ketertarikan dan Kesanggupan menerima Barang/Infrastruktur Aktivitas Pamsimas dari Kepala Desa/Lurah, serta Data Teknis Desa/Kelurahan Usulan Kegiatan Pamsimas.		
2	Verifikasi Kesesuaian Administrasi Surat Usulan.	• Surat Usulan Lokasi Kegiatan Pamsimas dari Pengusul. • Lampiran Usulan Lokasi Kegiatan Pamsimas. • Surat Pernyataan Minat dan Kesediaan menerima menerima barang/infrastruktur dari pemerintah dengan ada Data	Direktorat SSPIP	Hasil verifikasi menyatakan: • Usulan sudah sesuai dilanjutkan ke tahap Verifikasi Data Dukung. Usulan tidak sesuai diberikan kesempatan perbaikan

Tabel 1.1 Alur mekanisme implementasi pamsimas

No	Aktivitas	Uraian	Supervisor.	Hasil/Keterangan
		Teknis Desa/Kelurahan Usulan pengimplementasi kegiatan pamsimas. • Surat pernyataan tidak tercover masuk ke pelayanan air minumsanitasi UPTD/PDAM/Perum da.		
3	Verifikasi Data Dukung	• Kabupaten/Kota merupakan Zona fokus penanganan stunting secara terpadu yang ditentukan data bapenas Bappenas. • Status Desa/Kelurahan Definitif tercantum dalam BPS atau ketetapan Peraturan Daerah oleh Bupati/Walikota.	TPK-IBM Pamsimas, Direktorat Air Minum.	Hasil dilaporkan kepada Direktorat Air Minum dan menyatakan: • Usulan memenuhi kriteria dilanjutkan ke tahap Verifikasi Data Teknis. • Usulan tidak memenuhi kriteria, TPK-IBM Pamsimas bisa klarifikasi kepada Pengusul

Tabel 1.1 Alur mekanisme implementasi pamsimas

No	Aktivitas	Uraian	Supervisor.	Hasil/Keterangan
4	Verifikasi Data Teknis	• Tingkat akses masyarakat terhadap air minum layak di tingkat desa/kelurahan. • Wilayah pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS berada di luar cakupan layanan air minum UPTD/PDAM/Perumda • Adanya SPAM/air berlangsung bisa di perkaya • Jumlah target penerima manfaat (sambungan rumah).	Balai PPW (Tim Verifikasi BPPW).	• Hasil penilaian (scoring) dilaporkan kepada Direktorat Air Minum. • Pernyataan Minat dan Kesanggupan menerima Barang/Infrastruktur Aktivitas Pamsimas dari Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa/Lurah.
5	Validasi terhadap hasil Verifikasi Data Teknis.	• Hasil penilaian (scoring) dari Balai PPW. • Surat Pernyataan Ketertarikan dan Komitmen menerima Barang/Infrastruktur Program Pamsimas.	TPK-IBM Pamsimas, Direktorat Air Minum.	• Hasil validasi terhadap hasil verifikasi data teknis. Usulan dilanjutkan ke pemeringkatan bila sudah dilengkapi dengan Surat Ketertarikan dan Kesiapan menerima Barang/Infrastruktur Kegiatan Pamsimas.
6	Penyusunan Peringkat dan Usulan Penetapan	• Daftar peringkat berdasarkan hasil penilaian	TPK-IBM Pamsimas, Direktorat Air Minum	Daftar Usulan Lokasi Sasaran.

Tabel 1.1 Alur mekanisme implementasi pamsimas

No	Aktivitas	Uraian	Supervisor.	Hasil/Keterangan
	Lokasi Kegiatan Pamsimas.	(scoring). • Dalam hal nilai (scoring) sama maka dilakukan pemeringkatan.		
7	Telaah Kesesuaian Lokasi Usulan Kegiatan Pamsimas dengan sasaran dan kebijakan Program IBM Cipta Karya.	• Daftar peringkat usulan lokasi. • Sasaran dan kebijakan program IBM Cipta Karya.	Direktorat SSPIP	Daftar Usulan Penetapan Lokasi Sasaran
8	Penetapan Lokasi Sasaran Kegiatan Pamsimas oleh Menteri PUPR.	Daftar usulan penetapan lokasi sasaran.	• Direktorat SSPIP. • TPK-IBM Pamsimas, Direktorat Air Minum.	Penetapan Lokasi Kegiatan IBM Cipta Karya melalui SK Menteri PUPR.

Dalam rangka memastikan efektivitas dan keberlanjutan program, revisi atau perubahan lokasi kegiatan PAMSIMAS mungkin diperlukan. Detail perubahan lokasi menurut (Petunjuk acuan operasional pamsimas, 2008) sebagai berikut:

1. Verifikasi dan penilaian usulan revisi lokasi sasaran Kegiatan Pamsimas dilakukan terhadap lokasi sasaran yang direvisi dan lokasi pengganti. Verifikasi dan penilaian terhadap usulan lokasi pengganti dilakukan Penetapan Lokasi Sasaran Kegiatan Pamsimas. Seluruh hasil verifikasi dan penilaian dipublikasikan laman Banper Kementerian PUPR dan aplikasi SIPPa modul Usulan IBM/Padat Karya.
2. Dirjen Cipta Karya menugaskan Direktur SSPIP dan Pimpinan Unit Eselon II Pembina untuk melakukan verifikasi terhadap usulan revisi lokasi KIBM.
3. Direktur SSPIP menugaskan pejabat/staf di Direktorat SSPIP untuk melakukan Verifikasi Kesesuaian Administrasi Usulan Revisi Lokasi KIBM.
4. Hasil verifikasi oleh Direktorat SSPIP menyatakan: jika usulan sesuai, lanjut ke tahapan Verifikasi Data Dukung. Jika usulan tidak sesuai, tidak diproses lebih lanjut.
5. Verifikasi Kesesuaian Administrasi dilakukan sebagaimana verifikasi kesesuaian administrasi pada Penetapan Lokasi Sasaran Kegiatan Pamsimas.

6. Setelah usulan revisi lokasi dinyatakan lolos dari verifikasi kesesuaian administrasi maka dilanjutkan pada tahap verifikasi data dukung. Direktur Air Minum menugaskan TPK-IBM Pamsimas untuk melakukan verifikasi justifikasi usulan revisi dan verifikasi data dukung usulan lokasi pengganti.
7. TPK-IBM Pamsimas melakukan Verifikasi Justifikasi Usulan Revisi dan Verifikasi Data Dukung Usulan Lokasi Pengganti, kemudian melaporkan hasil verifikasi kepada Direktur Air Minum.
8. Setelah usulan revisi lokasi dinyatakan lolos dari verifikasi data dukung maka dilanjutkan pada tahap verifikasi data teknis.
9. Setelah proses verifikasi terkait administrasi, data dukung dan data teknis selesai dilakukan, selanjutnya dilaksanakan validasi terhadap hasil verifikasi tersebut, yang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Direktur Air Minum menugaskan TPK-IBM Pamsimas untuk melakukan validasi dan menyusun peringkat berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kesesuaian administrasi, data dukung dan data teknis.
 - b. TPK-IBM Pamsimas melakukan validasi dengan cara pengecekan terhadap kelengkapan surat usulan revisi lokasi dan seluruh lampirannya. Melakukan pengecekan skor dengan status penilaian (layak/tidak layak) terhadap lokasi pengganti.
 - c. TPK-IBM Pamsimas melakukan penyusunan peringkat berdasarkan Nota.

- d. Penyusunan peringkat dilakukan terhadap usulan lokasi di masing-masing provinsi.
- e. Hasil pemeringkatan ini digunakan dalam penyusunan usulan penetapan revisi lokasi sasaran Kegiatan IBM Pamsimas yang disampaikan kepada Direktur SSPIP untuk proses penetapan oleh Menteri PUPR.

Upaya dilakukan pelaksana untuk usaha meninggikan/ mempermudah jalan warga untuk kelayakan dan keberlangsungan air minum. Strategi di implementasikan dengan pansimas melalui sistim program kerja berbasis tenaga lokal (Kementerian PUPR, 2023)

Pamsjmas dikelola warga secara utuhnya, dijalankan dari tahap rencana, implementasi, sampai-sampai pemeliharaan dilakukan oleh masyarakat, dilakukan melalui ciri khas wilayahnya. Jika dilihat air minum layak mencapai 91.05 persen. Target dari pusat air minum yakni 100 persen. Tahun 2023, Pamsimas mendapat sumber oleh APBN, sasaran 1.063 kelurahan/desa di Indonesia (Kementerian PUPR, 2023)

Perencanaan pamsimas tugas dari pemdes masing-masing, tugasnya meliputi.

1. Lembaga Tingkat desa/kelurahan

Tugas Pemerintah Desa/Kelurahan dalam tahap perencanaan Pamsimas antara lain adalah:

- a. Memberi fasilitas untuk bertemu residents, memusyawarahkan para kelompok desa dalam memberikan

kepastian warga untuk ikut serta untuk merencanakan kebijakan. Menjadi pimpinan kegiatan pamsimas untuk desa, dan dusun.

- b. Mengembangkan pelayanan SPAM agar 100% mendorong para management untuk program bisa berlanjut di desa. Memberi fasilitas susunan kontruksi perencanaan kegiatan sanitasi dan air minum dalam improvement hasil kerja SPAM.
- c. Bagi pemerintah desa menguatkan komitmen penyisihan anggaran digunakan sebagai pengembangan sanitasi dan air minum dengan cara pamsimas.

2. Petugas Pembimbing Komunitas Masyarakat

Petugas bertugas memberi fasilitas pada warga adalah tenaga kedua masyarakat untuk pamsimas, dibentuk oleh terdiri dari Fasilitator Senior dan Fasilitator Masyarakat. TFM berfungsi membantu masyarakat dalam mengembangkan wawasan dan keahliannya di bidang lembaga diperlukan perancangan dijalankan pada bidang teknis proses Pamsimas, operasi dan tata kelola baik merupakan kerangka utama sanitasi dan air minum.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PAMSIMAS berikut adalah jaringan fisik yang dibangun selama program PAMSIMAS berlangsung:

1. Sarana Air Minum: Sumur bor/sumur gali, Sistem perpompaan (pompa listrik/manual), Jaringan perpipaan distribusi air, Bak

penampungan/reservoir, Hidran umum/kran umum, Sambungan rumah.

2. Sanitasi Dasar: Jamban keluarga, MCK komunal, Saluran pembuangan air limbah, Sistem drainase lingkungan
3. Infrastruktur Pendukung: Bangunan pelindung sumber air, Rumah pompa/operator, Panel kontrol Listrik, Unit pengolahan air sederhana
4. Fasilitas Kelembagaan: Kantor pengelola SPAM, Peralatan administrasi, Alat ukur meteran air. (t.t.)

Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Program (Pamsimas, 2022) dari Kementerian PUPR, masyarakat yang berlangganan PAMSIMAS mendapatkan beberapa manfaat.

Akses Air Bersih : Pasokan air berkelanjutan, Kualitas air yang memenuhi standar Kesehatan, Pelayanan 24 jam (tergantung ketersediaan sumber air), Tekanan air yang stabil, Meteran air individual untuk mengukur pemakaian.

Hak sebagai Pelanggan : Tarif air yang terjangkau sesuai kesepakatan Masyarakat, Transparansi pengelolaan dana, Kesempatan berpartisipasi dalam rapat anggota, Hak suara dalam pengambilan keputusan pengelolaan.

Pendampingan dan Edukasi : Informasi tentang penggunaan air yang efisien, Penyuluhan tentang sanitasi dan kebersihan, Pelatihan pemeliharaan instalasi air.

Tabel 1.2 Total Hunian yang Terlayani Program

Nama Dusun	Pada thn	Jml Rumah	Tersalur Air	Persentase
Dusun Jajar	2023-2024	663 Rumah	63 Rumah	9,5%
Dusun Kalikajar	2023-2024	420 Rumah	7 Rumah	1,67%

Sumber: Pemerintah Desa Jajar (2024)

Berdasarkan tabel, peneliti mengamati dalam beberapa tahun terakhir, distribusi air bersih di Dusun Jajar masih menghadapi kendala.

1. Tercatat terdapat 663 total rumah Merujuk pada tabel tersebut, peneliti mengidentifikasi bahwa selama periode dua tahun, hanya 63 rumah di Desa Jajar yang berhasil memperoleh sambungan air bersih.
2. Pada dusun kalikajar dari total rumah 420 rumah hanya tersambung 7 rumah.
3. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah desa dalam penyediaan air bersih belum maksimal.

Terdapat kasus yang berlangsung saat berlangsungnya suplai air mendapat hambatan dalam penyediaan air bersih dalam aktivitas masyarakat. Penyediaan air bersih masih belum rata, justru proyek tersebut masih mendapati hambatan dalam proses penyaluran air bersih kepada masyarakat sekitar.

Fakta mengenai kasus penyediaan air bersih, yaitu :

1. Program pembangunan menetapkan kedalaman sumur minimal sebesar 100 meter. Ketentuan mengenai kedalaman sumur yang diregulasikan PAMSIMAS bermaksud untuk menjamin bahwa konstruksi sumur mampu menjangkau lapisan air tanah yang lebih dalam dan higienis. Namun dalam implementasinya, sejumlah besar penduduk kampung mengalami kesulitan signifikan dalam mematuhi regulasi ini. Pengeluaran untuk pembuatan sumur bor dengan jarak vertikal 100 meter kerap tidak terjangkau bagi komunitas yang mayoritas berekonomi lemah. Minimnya sumber pembiayaan menjadi hambatan dominan bagi kebanyakan rumah tangga untuk membangun sumur yang selaras dengan kaidah tersebut.
2. Terbatasnya pipa pada saluran utama belum terlaksana secara merata, masih terdapat banyak pipa yang rusak dan bocor, serta air menjadi keruh dan kotor dari dampak kerusakan pipa sehingga menghambat akses air.

Peneliti mendapat fakta keseluruhan belum dapat dilaksanakan dengan optimal, masih belum sesuai dengan angan-angan masyarakat, karena belum sepenuhnya air bersih dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Sejak dilakukan penyaluran dalam usaha pengelolaan air bersih.

Berdasarkan penjelasan Mengacu pada permasalahan pada bab sebelumnya, peneliti menetapkan judul penelitian sebagai berikut.
“Kebijakan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Berkelanjutan (Studi Pada Desa Jajar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

Bertumpu penjelasan uraian konteks sebelumnya, demikian inti dari persoalan diangkat dalam studi yaitu.

Bagaimana penerapan kebijakan program nasional air minum dan sanitasi berbasis masyarakat berkelanjutan di desa jajar, kecamatan wates, kabupaten kediri?

C. Tujuan Penelitian

Dari penjabaran rumusan masalah, demikian maksud persoalan ini, yaitu.

Telaah kebijakan terkait penyediaan air minum sanitasi berbasis masyarakat secara berkelanjutan tingkat nasional

D. Manfaat Penelitian

Bertumpu penjelasan uraian konteks sebelumnya, kontribusi riset memberikan kontribusi, antara lain.

- a. Temuan dalam riset bisa mampu memperluas wawasan pemahaman terkait soal implementasi kebijakan tingkat nasional penyediaan air minum sanitasi berbasis masyarakat secara berkelanjutan.
- b. Riset juga bisa berfungsi sebagai sarana dalam menggali serta menemukan beberapa ilmu dalam implementasi kehidupan di masyarakat, khususnya konteks penelitian terapan (applied research).

- c. Capaian riset ditargetkan bisa dijadikan petunjuk catatan tambahan kepada pihak pemerintah desa, dalam pengambilan kebijakan langkah penanganan dalam memaksimalkan air minum sanitasi.



BAB VII

PENUTUP

1. Kesimpulan

Program PAMSIMAS di Desa Jajar merupakan langkah strategis yang menunjukkan efektivitas pendekatan berbasis masyarakat dalam mengatasi krisis air bersih dan sanitasi. Program ini melibatkan berbagai pihak pemerintah pusat, daerah, lembaga internasional, serta masyarakat secara langsung untuk menyediakan infrastruktur fasilitas air bersih dan sanitasi yang memenuhi standar kelayakan. Meskipun baru mencakup sekitar 6,5% rumah tangga, program ini telah meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya hidup bersih dan sehat, serta mengurangi praktik buang air besar sembarangan. Pembentukan KP-SPAMS sebagai pengelola lokal mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal perluasan jaringan layanan, keberlangsungan pemeliharaan infrastruktur, dan konsistensi dukungan dari pemerintah desa.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program PAMSIMAS di Desa Jajar, diperlukan upaya strategis berupa perluasan cakupan sambungan rumah tangga, penguatan kapasitas kelembagaan KPSPAMS, pemeliharaan rutin infrastruktur, dan jaminan kontinuitas dukungan pemerintah lintas periode kepemimpinan. Program ini telah membuktikan bahwa pendekatan partisipatif dalam kebijakan publik dapat menghasilkan dampak positif, namun memerlukan komitmen jangka panjang dari semua stakeholder untuk mencapai pemerataan akses yang optimal.

2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian berkaitan dengan realisasi Program PAMSIMAS di Desa Jajar, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Mengevaluasi dan menyusun rencana strategis perluasan jaringan secara bertahap untuk mencapai lebih dari 70 rumah yang saat ini terlayani.

Perluasan jaringan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Jajar merupakan kebutuhan mendesak mengingat saat ini baru 70 dari 1.083 rumah (6,5%) yang terlayani. Rencana strategis ini disusun untuk memetakan langkah sistematis dalam memperluas cakupan layanan secara bertahap, efektif, dan berkelanjutan.

2. Mengevaluasi secara menyeluruh terhadap infrastruktur yang ada, mengenai keterbatasan sarana pemeliharaan dan kendala teknis yang menghambat distribusi air dalam program PAMSIMAS.

Dilakukan dengan fokus pada identifikasi dan analisis mendalam mengenai keterbatasan sarana pemeliharaan yang meliputi ketersediaan peralatan, sumber daya manusia terampil, dan anggaran operasional, serta mengkaji berbagai kendala teknis yang menghambat efektivitas distribusi air bersih, seperti permasalahan jaringan pipa distribusi, sistem pompa yang tidak optimal, kualitas sumber air baku, dan tantangan geografis wilayah layanan yang mempengaruhi kualitas pelayanan air kepada masyarakat.

3. Mengevaluasi dan memberikan pelatihan pada petugas pengelola sistem distribusi air untuk meningkatkan keterampilan dalam penanganan masalah teknis yang mungkin muncul sewaktu-waktu.

Integrasi antara peningkatan sarana pemeliharaan dan pengembangan kapasitas SDM ini menciptakan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan jangka panjang program air bersih berbasis masyarakat di desa jajar, di mana masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan eksternal tetapi memiliki kemampuan mandiri dalam memelihara dan mengoperasikan sistem air bersih mereka secara berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

JURNAL :

- Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu.
- Anderson James, 2006. Public Policymaking: An Introduction. Houghton Mifflin.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Arnstein, Sherry R. (1969): A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35: 4, 216-224.
- Bautista dkk., 1995, Experiences in the development of small-scale water resources in rural areas : proceedings of the International Symposium on Development of Small-scale Water Resources in Rural Areas : 21-25 May 1990, Bangkok and Khon Kaen, Thailand, Carl Duisberg Gesellschaft, South East Asia Programme Office: Bangkok, Thailand
- Bhattacharyya, J. (2004). Community development Theorizing Community development. *Journal of the Community development Society*, 34(No.2), 5-34.
- Brundtland, G.H. (Ed.). (1987). *Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development*. Oxford University Press
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). Rural development participation: Concepts and measures for project design, implementation and evaluation. Rural Development Committee, Center for International Studies, Cornell University
- Dye, Thomas R. 2013. *Understanding Of Public Policy*. New Jersey : Prentice Hall
- Finanda, A. S., Fadhila, J. F., & Hayat. (2024). Implementasi Prinsip Prinsip Pelayanan Publik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1); 74-78. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.9.1.2024.74-78>
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: the politics of alternative development*. Blackwell.

- Hayat, H. (2017). Peneguhan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(2), 175-188.
- Hayat, H. (2020). Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik. *Aristo*, 8(1), 1-26.
- Hayat, H. (2024). Public Policy Innovation in Objectifying Excellent Service. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8(1), 67-76.
- Hooghe, L. and Marks, G., 2001. Multi-level governance and European integration. Rowman & Littlefield
- ROFIL, R., & Maryono, M. (2018). *PENDEKATAN WATER POINT MAPPING (WPM) DALAM MONITORING PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH PENDUDUK DI KABUPATEN AGAM STUDI KASUS JORONG LIMO BADAQ NAGARI MALALAK TIMUR* (Doctoral dissertation, School of Postgraduate).
- Mazmanian, D.A and Sabatier, P.A. 1983. Implementation and public policy. London: Scoot, Foresman and company
- Mc Clelland, David. C. 1988. Human Motivation. New York : Cambridge University Press.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). IBandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. F. (2023). *STRATEGI HUMAS PERUM BULOG DALAM MEMPERBAIKI CITRA TERKAIT KASUS BERAS BATU MELALUI MEDIA DIGITAL (Studi Pada Pemberitaan Bantuan PPKM 2021 di Pandeglang)* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Niken Ayu Febrianti, Hayat, Agus Zainal Abidin. 2023. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PEMBAYARAN REKENING AIR SECARA ONLINE PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOJONEGORO : Journal Publicuho

Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan.

Rogers, Everett M. 1986. Communication Technology: The New Media in Society. London : The Free Press.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Suyeno, S., Wijaya, A. F., & Hanafi, I. (2014). Implementasi Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kecamatan Mandau. *WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora*, 17(1), 21-34.

Titmuss, R.M. (1974) Social Policy: An Introduction. Allen & Unwin, London, 33-38.

Van Metter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.

WHO. (2015). Safely managed drinking water - thematic report on drinking water 2017. World Health Organization.

WEB :

Kemenkes – Permenkes No 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum - TP2S

<https://stunting.go.id/kemenkes-permenkes-no-492-tahun-2010-tentang-persyaratan-kualitas-air-minum/>. Diakses 2025-01-23 18:15:55

PERBUP Kab. Kediri No. 44 Tahun 2016.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44035>. Diakses 2025-01-07 19:15:29

Permenkes No. 32 Tahun 2017. Database Peraturan | JDIH BPK.

<http://peraturan.bpk.go.id/Details/112092/permenkes-no-32-tahun-2017>

PT 2 Juknis Perencanaan Tingkat Masyarakat 2022 | PDF

<https://id.scribd.com/document/608200482/Pt-2-Juknis-Perencanaan-Tingkat-Masyarakat-2022> Diakses 2025-01-07 09:14:08

Tingkatkan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak, Kementerian PUPR Sasar 1.063

Desa pada Pamsimas TA 2023 - Balai Wilayah Sungai Sumatera I. Kementerian PUPR.

<https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1/article/tingkatkan-akses-air-minum-dan-sanitasi-layak-kementerian-pupr-sasar-1063-desa-pada-pamsimas-ta-2023> . Diakses 2025-01-07 07:14:58

BUKU :

- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Alih Bahasa oleh Samoedra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Heruanto Adna, dan Erwan Agus Purwanto). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harbani .Pasolong. 2002. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Bandung
- Hayat (2017). *"Manajemen Pelayanan Publik"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hayat, H., & Si, M. (2018). Kebijakan publik: evaluasi, reformasi dan formulasi. Intrans Publishing.
- Hayat. (2018). Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro. Kencana
- Heinz, Ealau and Kenneth, Prewitt. 1973. Labyrinths Of Democracy Adaptations, Linkages, Representation, and Policies in Urban Politics. Indianapolis: Ardent Media
- Islamy, Muh. Irfan (2014) *Kebijakan Publik*. In: Definisi dan Makna Kebijakan Publik. Universitas Terbuka, Jakarta, pp. 1-41. ISBN 9796896621
- Irawaty, 2002. Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris. Yogyakarta: Tanah Air Beta
- Jakobis Johanis Messakh. 2017. Pengelolaan Sumber Daya Air. Sulawesi: PMIPA Press
- Knoepfel, Peter., Larrue, Corinne., Varone, Frédéric., and Hill, Michael. 2007. Public Policy Analysis. UK: The Policy Press University of Bristol
- Kodoatie, Robert j dan syarief , Roestam . 2010. "Tata Ruang Air" Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Leo, Agustino. "Politik lokal & Otonomi Daerah." *Alfabeta, cv* (2014).
- Muchlas, Hamdi. 2015. Kebijakan Publik. Proses, Analisis, dan Partisipasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tim Persiapan Program PAMSIMAS (Ed). 2008. Pedoman Pelaksanaan PAMSIMAS Di Tingkat Masyarakat | NAWASIS – National Water and Sanitation Information Services. Jakarta: Central Project Management Unit Program PAMSIMAS

Situmorang Chazali. (2016). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). Social Security Development Institute (SSDI).

Wahab, Solichin Abdul. 2016. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara.

Water for life: making it happen, 2005. Geneva, Switzerland : World Health Organization : Unicef

UNDANG-UNDANG :

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

PP No. 122 Tahun 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

<http://peraturan.bpk.go.id/Details/5701>

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sumber LN.2014/No. 7, TLN No. 5495, LL SETNEG: 65 HLM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air